

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan memiliki banyak suku yang berada diseluruh kepulauan Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Irian Jaya. Keanekaragaman budaya dan sumber daya alam tersebut terkadang menimbulkan konflik yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, adanya korban jiwa dan materi.

Keanakeragaman tersebut terdapat adanya status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut jender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Sehingga didalam suatu kelompok masyarakat sering memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda, ketika apa yang menjadi sasarannya berbeda atau bertentangan maka akan terjadi konflik.

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita (Simon Fisher, 2000:4).

Konflik merupakan sebuah kata yang menggambarkan pertikaian, perselisihan, maupun ketidaksepahaman antara dua orang atau lebih dan antara dua golongan atau lebih. Sebagian pakar menggambarkan konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih percaya bahwa mereka memiliki ketidakselarasan tujuan atau suatu perjuangan untuk mendapat status, kekuasaan, dan sumber daya, yang tujuannya adalah untuk meniadakan saingan. (Loui Coser, 1965). Cara berpikir dan bertindak untuk meniadakan saingan atau rival yang berpotensi merebut, menghalangi niat seseorang atau satu golongan untuk mendapat apa yang mereka inginkan inilah yang seringkali menyebabkan konflik. Kehidupan sosial politik suatu masyarakat pasti akan mengalami konflik karena pergesekan antar kepentingan yang ada seringkali tidak bisa dihindari. Hal yang perlu dihindari dalam berkonflik adalah adanya kekerasan, baik fisik maupun nonfisik karena konsekuensinya bersifat merusak atau destruktif.

Konflik timbul karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan antar pribadi dalam kelompok, organisasi masyarakat dan negara, semua bentuk hubungan manusia sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Seperti contohnya adalah kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, kekuasaan yang tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan.

Fisher mengklasifikasi sumber-sumber konflik dalam teori penyebab konflik yang masing-masing, dengan metode dan sasaran yang berbeda, keenam teori tersebut ialah:

1. Teori Hubungan Masyarakat, teori ini menganggap bahwa sumber konflik berawal dari ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda didalam suatu masyarakat.
2. Teori Negosiasi Prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
3. Teori Kebutuhan Manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan sebuah inti pembicaraan.
4. Teori Identitas, berasumsi bahwa konflik di sebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.
5. Teori Kesalah Pahaman antar-Budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.
6. Teori Transformasi Konflik, berasumsi bahwa sumber konflik berasal dari masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi (Fisher, dalam Adi Fahrudin, 2011:176 termuat dalam *Prosiding The 5<sup>th</sup> International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*)

Salah satu contoh konflik antar etnis yang terjadi di Indonesia adalah seperti yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, konflik antar kelompok sering kali terjadi dimana-mana. Konflik horizontal yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik

akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Sebut saja daerah yang sering terlibat konflik diantaranya Desa Buangin dan Desa Dandang yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik komunal ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar pemuda yang kadang merupakan konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah, selain kerugian material, konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban jiwa. Konflik antar kelompok yang terjadi di Desa Buangin dan Desa dandang ini sangat begitu memprihatinkan, karena konflik ini sudah begitu lama, akan tetapi pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini. Terbukti perkelahian antar pemuda desa tersebut sering kali terjadi. Seharusnya pemerintah setempat lebih serius dalam menangani kasus tersebut. Masalahnya setiap konflik yang terjadi tidak jarang menimbulkan banyak kerugian (Ayyub Siswanto, 2014).

Keanekaragaman suku, budaya yang tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika tidak selamanya satu. Perbedaan suku, bangsa serta agama terkadang menimbulkan konflik di masyarakat yang berujung pada tindakan anarkis. Konflik biasanya dipicu oleh adanya kesalahpahaman antar suku, adanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan aspirasi rakyat, sehingga memunculkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal apalagi jika konflik tersebut dipicu oleh perselisihan antar elit politik yang membawa arogansi

kesukuan yang cukup kental di wilayah Provinsi Lampung serta berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban bernegara dan bermasyarakat. Konflik yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda tetapi juga nyawa. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung pada kurun waktu Tahun 2012 telah terjadi konflik yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti contoh pada kasus di bawah ini (Polda Lampung, 2014):

Pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2012 terjadi kasus konflik di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Dari Informan yang peneliti peroleh disana, bahwa kasus yang terjadi di Desa Balinuraga adalah kasus yang berawal dari kasus sosial, bagaimana soal kecil yang menyangkut isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda Desa Balinuraga terhadap remaja desa Agom Kecamatan Kalianda dari dugaan pelecehan seksual sampai akhirnya berujung menyinggung ke soal Sukuisme atau Etnisitas. Kasus yang terjadi di Desa Balinuraga adalah murni kasus Etnis atau Suku, tidak pernah kasus yang terjadi di Desa Balinuraga menyangkut soal Agama. Memang harus ada penjelesan tentang kasus yang sebenarnya tentang awal mula kasus yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji. Sebelum terjadi konflik yang terjadi, adalah konflik antar pemuda yang berawal akibat dugaan pelecehan seksual.

Setelah kasus yang melibatkan pemuda kedua Desa yang terjadi di Desa Balinuraga, akhirnya berlanjut kasus konflik tersebut menjadi kasus konflik yang besar dengan menyangkut tentang Etnis, dimana antar Suku Lampung yang terdiri dari masyarakat Desa Agom dan Suku Bali yang mendiami Desa Balinuraga yang terjadi di Desa Balinuraga. Harus ada ketegasan tentang kejelasan tentang kasus

yang terjadi sebenarnya, bahwa kasus konflik yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Oktober pada tahun 2012 adalah murni kasus Konflik Etnis.

Kecamatan Kalianda sendiri dalam masyarakatnya memang banyak terbagi dari beberapa suku dan mayoritas bersuku pribumi Lampung Pesisir. Suku Lampung yang berada di daerah tersebut sangat menjunjung sekali persatuan dan kesatuan. Oleh Karena itu bila dilihat bahwa konflik yang terjadi di Desa Balinuraga merupakan bentuk solidaritas mereka antar sesama suku Lampung. Selain itu di Kecamatan Way Panji suku Bali yang mendiami wilayah tersebut sangat tertutup terhadap penduduk pribumi. Hal ini dikarenakan mereka hidup berkelompok dan memiliki peraturan sendiri dan cenderung tertutup terhadap penduduk yang lain.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan konflik ini terjadi adalah karena kurang komunikasi yang terjadi antara kedua Suku, karena pengelompokan tempat tinggal. Mereka jarang sekali melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar yang berbeda suku. Hal ini bisa mempengaruhi kenapa awal mula dari kasus konflik yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan tersebut bisa terjadi.

Kasus Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji ini merupakan tanggung jawab dari Pemerintah daerah dan *stakeholder* yang terkait. Kasus yang sudah terjadi kurang lebih 1 tahun lamanya ini adalah kasus yang masih menjadi perbincangan karena bagaimana dan seperti apa peran Pemerintah Daerah ini dalam penanggulangan konflik sosial ini. sendiri. Secara umum masyarakat yang mendiami desa Balinuraga tersebut belum mengetahui apa saja

yang menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik ini. Masyarakat hanya mengetahui hanya terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik tanpa mengetahui kebijakan lanjutan apa yang dilakukan pemerintah daerah agar kejadian ini tak terulang lagi.

Masyarakat sendiri apakah memang merasakan dan melihat apakah memang ada peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan Konflik ini. Karena hal itu pula yang akhirnya membuat peneliti tertarik mengangkat judul ini untuk menjadi bahan penelitian, karena masyarakat sendirilah yang memang merasakan dan melihat langsung apakah memang ada peran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menanggulangi konflik desa Balinuraga ini.

Menurut penulis masalah tersebut dikarenakan masalah sepele, namun lepas dari sebab terjadinya konflik itu perlu ditekankan mengenai perilaku generasi muda sebagai penerus bangsa ini. Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, semestinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi landasan nilai dan prinsip yang terus mengalir bagi setiap generasi. Namun dalam perjalanannya, pembangunan karakter bangsa Indonesia yang telah dilaksanakan sejak lama sering mengalami hambatan-hambatan dengan adanya sejumlah kasus yang melibatkan kehidupan antar umat beragama sekaligus masih banyaknya kekerasan atas nama golongan dan kelompok tertentu di Indonesia.

Globalisasi sebagai acuan untuk mengkaji pembangunan karakter bangsa terutama bagi generasi muda Indonesia menuju pada kemandirian bangsa dengan

berlandaskan pada Pancasila untuk menghadapi derasnya arus globalisasi. Dalam proses membangun karakter suatu bangsa, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pendidikan baik itu secara formal maupun non formal sehingga pengaruh negatif dari globalisasi dapat dikurangi terutama bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang menentukan masa depan. Generasi muda sekaligus sebagai generasi yang paling rentan terkena dampak negatif dari globalisasi sehingga peran pendidikan karakter bangsa serta pembangunan karakter bangsa dengan berlandaskan Pancasila menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjadikan bangsa Indonesia mandiri di era globalisasi.

Penanganan konflik sosial dapat dijelaskan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial, mengatakan bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Kondisi konflik dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik, oleh sebab itu. dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah, DPRD dan aparat penegak hukum diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan konflik, dapat



membuat sistem peringatan dini, mengingat kasus di Balinuraga ini bukanlah kasus baru.

Situasi ini menjadi rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal, yang mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Peran pemerintah dalam hal ini sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat yang bertikai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap peranan pemerintah terhadap Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga. Penelitian dan analisis tersebut dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul :“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Penanggulangan Konflik Sosial (Studi Kasus Konflik Warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan)”

## **B. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penanggulangan konflik sosial di Desa Balinuraga Lampung Selatan?”

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka persoalan pada penelitian ini adalah:

1. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penyebab konflik masyarakat di Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan konflik sosial warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apakah yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam penerapan kebijakan terkait dengan penanggulangan konflik sosial warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-Faktor yang menjadi penyebab konflik masyarakat di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan konflik sosial warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Pemerintah Daerah dalam penerapan kebijakan terkait dengan penanggulangan konflik sosial warga Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis penelitian ini meliputi:

Sebagai pengembangan keilmuan, khususnya ilmu sosial dan politik dalam penanganan konflik dan sebagai bahan referensi bagi para teoritis dan pengambil kebijakan dalam menambah khasanah pengetahuan tentang konflik di masyarakat.

2. Kegunaan secara praktis dari penelitian ini meliputi:

Secara praktis sebagai bahan yang dapat di pertimbangkan bagi pemerintah daerah dalam menyikapi kasus konflik yang ada di daerahnya.

### E. Kerangka Konsep

